

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 1996-2008 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB riil per kapita sebagai perwakilan dari pertumbuhan ekonomi jangka pendek mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Kenaikan PDRB riil yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan selama periode kajian dimungkinkan karena kenaikan pendapatan hanya terjadi pada kelompok berpendapatan tinggi.
2. Nilai kuadrat dari Ln PDRB riil per kapita sebagai perwakilan dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini diindikasikan bahwa pada tahap pembangunan yang lebih maju dimana sektor-sektor ekonomi sudah berkembang maka ketimpangan pun akan berkurang.
3. Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya semakin tingginya tingkat inflasi menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Tingkat pengangguran mempunyai pengaruh negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan

pendapatan golongan menengah ke bawah lebih rendah dari laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan atas, sehingga penurunan tingkat pengangguran tidak diiringi dengan penurunan ketimpangan pendapatan.

5. Persentase Bagian Konsumsi Pemerintah dari PDRB riil mempunyai pengaruh positif dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah ternyata belum mampu menjadi alat redistribusi pendapatan selama periode kajian.
6. Persentase Sumbangan Sektor Industri pada PDRB riil selama periode kajian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
7. Investasi swasta tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.
8. PDRB riil per kapita, Nilai Kuadrat LnPDRB riil per kapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Bagian Konsumsi Pemerintah dari PDRB riil, Persentase Sumbangan Sektor Industri pada PDRB riil, Investasi Swasta secara simultan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan hasil penelitian cenderung merupakan saran terhadap implikasi kebijakan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus secara cermat menterjemahkan peningkatan pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Karena bisa saja

peningkatan per kapita masyarakat di dorong oleh peningkatan pendapatan golongan penduduk yang berpendapatan tinggi saja. Untuk menghindari semakin melebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, pemerintah dapat menerapkan pengenaan pajak langsung dan progresif. Pajak pendapatan progresif langsung itu ditujukan pada pendapatan perusahaan maupun individu, di mana yang kaya diminta membayar pajak yang semakin besar persentasenya dari penghasilan total mereka dibandingkan dengan yang miskin kemudian pemerintah dapat meredistribusikannya lagi melalui proyek-proyek yang pro terhadap penduduk miskin.

2. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata dalam berbagai dimensi, baik dalam dimensi sektoral maupun regional sehingga apabila pembangunan sudah pada tahap yang lebih tinggi dan maju, maka kesejahteraan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pun akan terjadi secara merata.
3. Inflasi cenderung memperburuk pendapatan riil, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus dengan cermat dan penuh perhitungan dalam menangani fenomena inflasi.
4. Berkaitan dengan tingkat pengangguran, variabel ini ternyata bersifat regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, hal ini jangan begitu saja diartikan bahwa meningkatnya pengangguran maka ketimpangan pendapatan akan berkurang, justru fenomena ini bisa juga diartikan bahwa apabila pengangguran meningkat maka semakin meratalah kemiskinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan iklim positif dalam

penciptaan lapangan kerja. Perwujudan hal tersebut harus didukung oleh kebijakan lain seperti kebijakan yang mendorong masuknya investasi yang merata ke setiap daerah, baik investasi domestik maupun investasi asing, sehingga peningkatan investasi ini dapat memperluas lapangan kerja. Disamping itu perlu juga dilakukan perubahan dalam kebijakan pengupahan tenaga kerja.

5. Pemerintah harus secara progresif meningkatkan anggaran khususnya pengeluaran dalam bidang pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu juga harus disertai dengan ketepatan sasaran dalam penyaluran anggaran. Pengeluaran pembangunan tersebut juga harus digunakan untuk proyek-proyek yang lebih produktif sehingga masyarakat dapat menerima manfaat tersebut.
6. Strategi pembangunan industri sebaiknya diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya alam masing-masing daerah atau provinsi agar terjadi penyebaran yang merata dalam pembangunan industri.
7. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Disamping itu pemerataan penanaman modal juga harus dilakukan baik secara sektoral maupun regional agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.